



Media: Republika

Hari: Sabtu

Tanggal: 05 September 2020

Halaman: 3

Honor Jasa Nakes Dinilai Kecil

Pemkot Yogyakarta harus memberi dukungan penuh terhadap nakes.

■ SILVY DIAN SETIAWAN

YOGYAKARTA — DPRD Kota Yogyakarta menilai masih ada kesenjangan terkait honor jasa pelayanan tenaga kesehatan (nakes) dengan ASN Pemkot Yogyakarta. DPRD Kota Yogyakarta pun meminta pemkot untuk meninjau ulang honor jasa pelayanan nakes, terutama yang ada di garda depan menangani kasus Covid-19.

"Penghitungan ulang besaran jasa pelayanan nakes disesuaikan dengan tarif BPJS terbaru. Sehingga bisa setara atau bahkan lebih dengan besaran TPP (tambahan penghasilan pegawai) ASN Pemkot lainnya," kata anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Nurcahyo Nugroho dalam keterangan resminya, Jumat (4/9).

Menurutnya, honor jasa pelayanan nakes di Yogyakarta relatif kecil. Nurcahyo menyebut, kecilnya honor jasa pelayanan nakes ini dikarenakan turunya jumlah kunjungan pasien, adanya rujukan berjenjang,

klaim BPJS yang tersendat, dan belum adanya peninjauan tarif.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2020, disebutkan besaran TPP yang diterima nakes sebesar 45 persen dari penerimaan besaran ASN di lingkungan Pemkot Yogyakarta. Hal ini, kata Nurcahyo, menunjukkan adanya kesenjangan antara nakes dan ASN Pemkot Yogyakarta. Untuk itu, perlu langkah serius dari Pemkot Yogyakarta dalam menyikapi kesenjangan yang terjadi pada nakes.

Diharapkan, nantinya nakes di Kota Yogyakarta dapat memberikan pelayanan dengan optimal dan mendapatkan hak yang berimbang sesuai dengan profesi. Ia juga mengatakan, Pemkot Yogyakarta harus memberi dukungan penuh terhadap nakes. Terlebih, saat ini sudah banyak nakes yang terpapar Covid-19.

"Perlu konsistensi dan komitmen dukungan penuh oleh Pemkot Yogyakarta dari sisi perlengkapan alat pelindung diri. Selain itu juga perlu

adanya tambahan insentif bagi tenaga kesehatan," ujarnya.

Hingga 4 September ini, nakes yang terpapar Covid-19 masih terus meningkat. Bahkan, dilaporkan ada enam kasus baru positif Covid-19 yang merupakan karyawan kesehatan di DIY pada 4 September 2020. Uji usap (swab) massal pun diprioritaskan bagi karyawan kesehatan karena memiliki risiko besar terpapar Covid-19. Hingga saat ini, uji usap massal terhadap karyawan kesehatan masih berlanjut di DIY.

Kemarin, kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 di DIY bertambah 18 kasus pada. Sebanyak 18 kasus baru ini terdiri dari tersebar di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman. "Dua kasus baru dilaporkan Kota Yogyakarta, tujuh kasus dari Bantul dan sembilan kasus dari Sleman," kata Juru Bicara Penanganan Covid-19 untuk DIY, Berty Murtiningsih, Jumat.

Bertambahnya 18 kasus baru ini menjadikan total kasus positif di DIY menjadi 1.525 kasus. Berty menjelaskan, dari 18 kasus baru yang dilaporkan, enam kasus di antaranya merupakan tenaga kesehatan. "Enam tenaga kesehatan ini merupakan warga Bantul," ujar Berty.

Selain adanya tambahan kasus baru, Berty juga melaporkan 21 kesembuhan positif Covid-19. Tambahan tersebut menjadikan total kasus sembuh di DIY menjadi 1.096 kasus atau 72 persen. Kasus sembuh yang dilaporkan terbanyak di Sleman yang mencapai 14 kasus sembuh. Sementara, tiga kasus sembuh merupakan warga Kulonprogo, dua kasus sembuh di Kota Yogyakarta, Bantul, dan Gunungkidul masing-masing melaporkan satu kasus sembuh.

"Dilaporkannya 18 kasus baru dan 21 kasus sembuh di DIY, merupakan pemeriksaan terhadap 565 sampel dari 407 orang yang menjalani tes swab," jelas Berty.

Sementara, kasus positif yang meninggal dunia kemarin juga bertambah satu kasus di DIY. Satu kasus meninggal dunia ini merupakan warga Kulonprogo, yang meninggal karena ada komorbid (penyakit penyerta) yakni penyakit jantung. "Laporan jumlah kasus meninggal sebanyak satu kasus, sehingga total kasus meninggal sebanyak 44 kasus," kata Berty. ■ ed: lernan rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1.	☐ Negatif	☐ Amat S
2.	☐ Positif	☐ Seger
3.	☐ Netral	☐ Biasa
4.		
5.		

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005